



REVIU

LKIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

SEKRETARIAT DPRD  
KOTA BEKASI -2023

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 ini dapat tersaji sebagai sarana evaluasi yang konstruktif, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 12 Januari 2024

The seal is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BEKASI' at the top and 'SEKRETARIAT DPRD' at the bottom. In the center is the official emblem of Bekasi City, which includes a shield with a book and a quill, flanked by two figures, and topped with a crown. Below the emblem, the text 'SEKRETARIAT DPRD' is written again.  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**  
*[Handwritten Signature]*  
**Drs. HANAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IVc**  
**NIP. 196440424 199011 1 002**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iii
<b>Daftar Gambar dan Chart</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	5
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	11
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	18
1.5. Sistematisasi Penyajian .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	20
2.1. Rencana Strategis (Renstra) .....	20
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	21
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	24
2.2. Perjanjian Kinerja .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	37
3.1.1. Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi .....	37
3.1.2. Evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dan Analisis program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi .....	39
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	45
3.3. Realisasi Anggaran .....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	62
4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Rencana Tindak .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi .....	8
Tabel 1.2. Formasi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Eselon .....	10
Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana .....	10
Tabel 1.5. Peta Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	16
Tabel 2.1. Tabel dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 .....	22
Tabel 2.2. Tabel dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 (Perubahan) .....	23
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 .....	24
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 .....	25
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 .....	27
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Per Triwulan .....	27
Tabel 2.7. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 (Murni dan Perubahan) .....	29
Tabel 3.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pada RPJMD Murni 2018-2023 .....	37
Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Bekasi Pada RPJMD Murni 2018-2023 (Perubahan) .	38
Tabel 3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 ...	39
Tabel 3.4. Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 Terhadap Indikator Kinerja Utama .....	46
Tabel 3.5. Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu .....	47
Tabel 3.6. Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu	49
Tabel 3.7. Capaian IKU Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu .....	51
Tabel 3.8. Penilaian Sakip .....	52
Tabel 3.9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran .....	53
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2023 .....	56

## DAFTAR GAMBAR DAN *CHART*

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	6
<i>Chart</i> 1.1	Kualifikasi Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	8

# BAB I – PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Bekasi;
2. Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan dewan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi terhadap penyelenggara Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang pertama ialah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu. Prosentase ini merupakan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Perda. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Penetapan sasaran strategis ini untuk meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
2. Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang kedua adalah Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penetapan sasaran strategis ini untuk meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang ketiga adalah Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Indikator ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.



4. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terakhir ialah Nilai AKIP Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-1 RPJMD Kota Bekasi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel. Terutama untuk menunjang pencapaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun jika melihat Kinerja yang ditingkatkan pada Tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu pada Tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar 106.38%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 80% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75,20%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2023.
2. Indikator Prosentase Pengesahan Anggaran memperoleh capaian kinerja sebesar 132,98% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75,20%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2023.
3. Indikator Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu memperoleh capaian kinerja sebesar 132,98% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75,2%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2023.

4. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 81,68% capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah memastikan Peningkatan dari capaian Tahun 2023.
5. Adapun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2023 yaitu adanya penjadwalan kegiatan DPRD serta peningkatan sinergitas antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 ini.

## **I.2. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

1. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
2. Pengelolaan administrasi umum yg meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretaris DPRD Kota Bekasi dibantu oleh 4 Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota dalam bentuk Sekretariat DPRD. Struktur organisasi pada Sekretariat DPRD disajikan pada Gambar 1.1 berikut:



Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2023

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
  1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Bagian Program dan Keuangan
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 151 orang aparatur yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 52 orang PNS dan 99 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah Sekretaris DPRD (Esselon II) = 1 orang, Kepala Bagian (Esselon III) = 4 orang, Kepala Sub Bagian (Esselon IV) = 2 orang, dan JFT Penyetaraan Jabatan = 7 orang. Untuk lebih jelasnya tampak pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

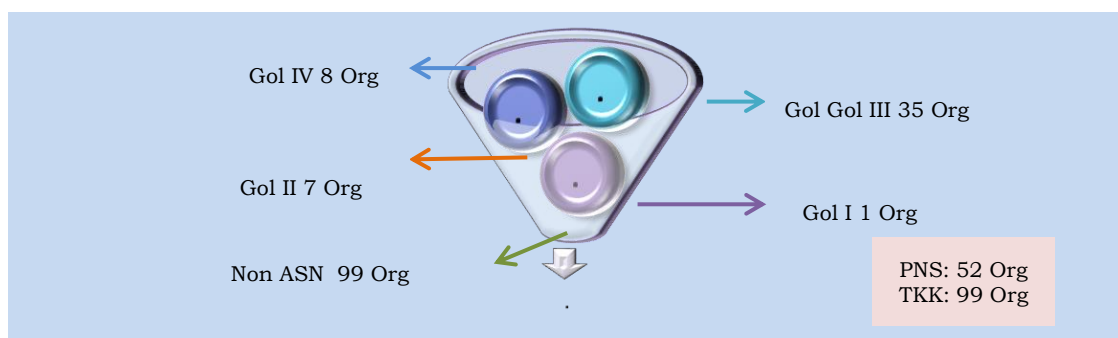
**Tabel 1.1**  
**Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan**  
**Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

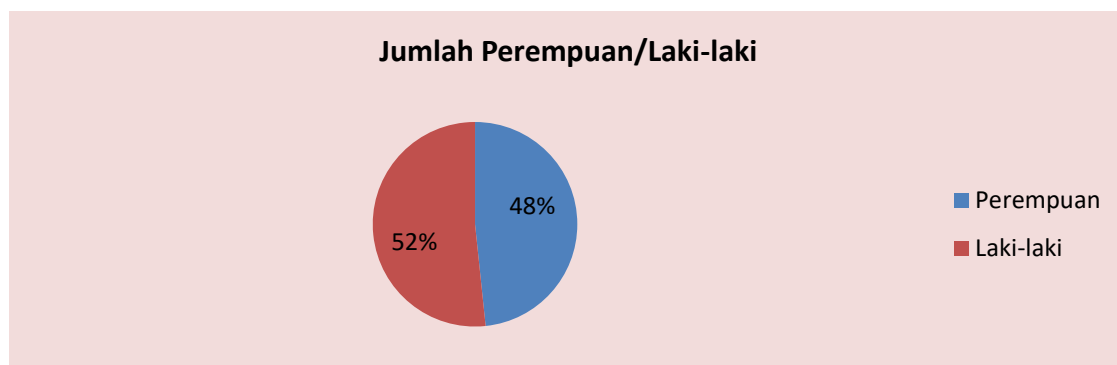
Uraian Jabatan	Pemangku Jabatan
Sekretaris DPRD Kota Bekasi	: Hanan, M. Si
Kepala Bagian Umum	: Eka Hidayat Taufik, S.IP, M.T
Kepala Bagian Program dan Keuangan	: Dra. Ida Sahida. S. M.Pd, M. Si
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	: Dzikron, S.T
Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	: Ahmad Sahroni, S. Sos, M. Si
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	: Kamirin, S. AP
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	: Nazirwan, S. T
Perencana Ahli Muda	: Reviola Harly, S. H, M. Si
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	: Alit Juniawati, M. Si
Analisis Kebijakan Ahli Muda	: Lania Octorra, S. IK, M. Si
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	: Gomos Jaksa Putra Simanjuntak, S. H
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	: Dra. Sri Dewi Tarpih. N, M. Si
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	: Pipik Anwar Sidik, S. Sos, M. AP
Analisis Kebijakan Ahli Muda	: Dra. Mulyani, M. M

*Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2023*

Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah 151 orang, terdiri dari 52 orang ASN dan 99 orang TKK. Dari *Chart 1.1* terlihat bahwa 52% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan.

**Chart 1.1**  
**KUALIFIKASI PEGAWAI PADA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



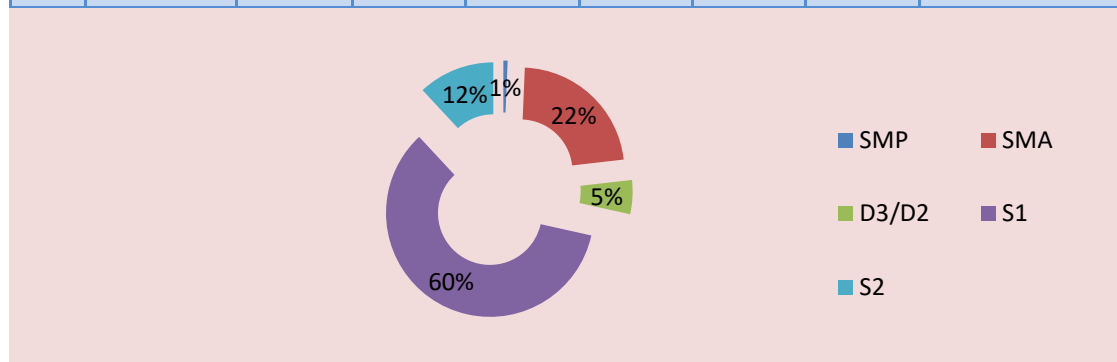


Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, 2023

Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP, seperti tampak pada Tabel

**Tabel 1.2**  
**FORMASI APARATUR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	STATUS	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	D2	SMA	SMP	
1	Pejabat	10	4	0	0	0	0	14
2	ASN	6	22	2	0	8	0	38
3	TKK	2	64	5	1	26	1	99
		<b>18</b>	<b>90</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>151</b>



Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, 2023

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh)

Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

Sehingga kondisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Esselon sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Eselon**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon Iib	1
2	Eselon IIIa	4
3	Eselon IVa	2
4	JFT Penyetaraan	7
	<b>Total</b>	<b>14</b>

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, 2023

Untuk menunjang segala kegiatan para Anggota DPRD Kota Bekasi dan pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	URAIAN Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin	JUMLAH
1	Alat Besar <i>(Portable Generating Set, Pompa Air)</i>	2
2	Komputer <i>(Mainframe, Komputer Jaringan Lainnya, PC unit, Laptop, Notebook, Tablet PC, Hardisk, Printer, Peralatan personal Komputer Lainnya, Server, Rak Server, Peralatan Jaringan Lainnya)</i>	365
3	Alat Angkutan <i>(SUV, Micro Bus, Mini Bus, Pick Up, Sepeda Motor)</i>	33
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Mesin Penghitung Uang, Lemari Besi/Metal, Lemari Kayu, Rak Besi, Rak Kayu, Filling Cabinet besi, Brankas, Kontainer, Lemari Display, Lemari Kaca, CCTV, papan Visual/Papan Nama, Copy Board/ Electric White Board, Alat penghancur Kertas, Mesin Absensi, LCD Projector/Infocus, Pintu Elektrik, Papan Gambar, Papan Pengumuman, Alat Kantor Lainnya, MejaKerja Besi/Metal, Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal, Meja Rapat, Meja Resepsionis, Meja Tambahan, Meja ½ Biro, Kursi Rapat, Kursi Tamu, Kursi Putar, Kursi Biasa, Kursi Lipat, Meja Komputer, Sofa, Jam Elektronik, Alat Pembersih Lainnya, Lemari Es, AC Central, AC Window, AC Split, Portable Air Conditioner, Kipas Angin, Exhaouse Fan, Tabung Gas, Televisi, Amplifier, Loudspeaker, Sound system, Wireless, Microphone, Unit Power Suppy, Camera Video, Camera Film, Alat hiasan, Aquarium, Dispenser, Mimpas/Podium, Handycam, heater, DVD Player, Alat Rumah Tangga Lain-lain, Alat Pemadam/Portable, Panel Pengontrol Kebakaran, Alat Pemadam Kebakaran lainnya,</i>	2448

NO	URAIAN Daftar Aset Tetap Peralatan Mesin	JUMLAH
	<i>Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Kerja Pejabat Eselon II, Meja Kerja Pejabat Eselon III, Meja Kerja Pejabat eselon IV, meja Kerja Pegawai Non Struktural, meja Kerja Pejabat Lain-Lain, Meja Kerja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Rapat Pejabat Eselon II, Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Rapat Pejabat lainnya, Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD, Kursi Kerja Pejabat eselon II, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Pejabat Eselon IV, Kursi kerja pegawai Non Struktural, Kursi Kerja Pejabat Lainnya, Kursi Rapat Menteri/Gubernur/ Bupati/Wali Kota, Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD, Kursi hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat eselon III, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya, Kursi Tamu di Depan Meja Adjudan Menteri/Gubernur/Bupati, Wali Kota, Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis, Buffet Kayu.</i>	
5	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b> <i>(Audio Amplifier, Audio Monitor Active, Microphone/Wireless MIC, Master Control Desk, Battery Charger (Peralatan Studio Audio), Chairman/Audio Conference, Digital Audio Taperecorder, Peralatan Studio Audio Lainnya, Video Monitor, Video Mixer, Video Processor, Power Supply (Peralatan Studio Video dan Film), Remote Control Unit, Tripod Camera, Lensa Kamera, Alat Pemanas Prosesing (water Heater), Layar Film/projector, mCamera Digital, Video Conference, Alat Studio Video Lainnya, Mesin Cetak elektronik, Mesin Cacah, Alat Studio Lainnya, Telephone (PABX), Pesawat telephone, Handy Talky (HT), Alat Komunikasi Telephone lainnya, Alat komunikasi social lainnya, Antene SHF Portable, Switcher/Patch Panel)</i>	267
6	<b>Alat Laboratorium</b> <i>(Tripod, Alat Degreening Jeruk Kap 100 kg, Recorder, fire extinguisher, layar)</i>	17
	<b>Total</b>	<b>3132</b>

Sumber: Data Bagian PTUK, 2024

### 1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/ Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi “Peningkatan Kualitas Aparatur Serta Dukungan Sinergitas Legislative Dan Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.



Sekretariat DPRD Kota Bekasi menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

1. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi Perda;
2. Bidang Anggaran bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
3. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Wali Kota.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi:

1. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara: membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah, mengajukan usul rancangan Perda dan menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Wali Kota, dan dilaksanakan untuk membahas KUA dan PPAS yang disusun Wali Kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda tentang APBD, membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan Peraturan Wali Kota, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut diatas memiliki Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Kota Bekasi sesuai dengan bidang kewenangan serta lembaga/ instansi vertikal lainnya yang terkait dengan bidang tugas komisi seperti berikut:

1. Komisi I bidang Hukum dan Kinerja Pemerintahan Daerah, meliputi bidang tugas:
  - a. Kinerja Pemerintahan;
  - b. Keamanan;
  - c. Ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Penerangan/Pers;
  - e. Hubungan Masyarakat;
  - f. Hukum/Perundang-undangan;
  - g. Pertanahan;
  - h. Kependudukan dan catatan sipil;
  - i. Kepegawaian/Aparatur;
  - j. Sosial;
  - k. Politik;
  - l. Organisasi Masyarakat;
  - m. Pertahanan;
  - n. Perijinan;
  - o. Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil;
  - p. Kerjasama & Investasi;
  - q. Komunikasi & Informasi;
  - r. Transformasi & Pemadam Kebakaran; serta
  - s. Keluarga Berencana & Pengendalian Penduduk.
2. Komisi II bidang Pembangunan, meliputi bidang tugas:
  - a. Pembangunan Pasar;
  - b. Pertanian & Perkebunan;
  - c. Ketahanan Pangan;
  - d. Peternakan & Perikanan;
  - e. Menara Pemancar;
  - f. Bina Marga;
  - g. Tata Air;
  - h. Sarana Jaringan Utilitas;
  - i. Lingkungan Hidup;
  - j. Perhubungan & Transportasi;
  - k. Pemetaan & Tata Ruang Wilayah;
  - l. Penerangan Jalan Umum;

- m. Kawasan Pemukiman & Pertanahan;
  - n. Pengawasan, Pembangunan & Kebersihan;
  - o. Pertamanan; dan
  - p. Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Komisi III bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi bidang tugas:
- a. Keuangan Daerah;
  - b. Perpajakan;
  - c. Retribusi;
  - d. Perbankan;
  - e. Perusahaan Daerah;
  - f. Badan Pengelola;
  - g. Pengelolaan Aset & Kekayaan Daerah;
  - h. Energi & Sumber Daya Mineral;
  - i. Perusahaan Patungan/Dunia Usaha/Yayasan;
  - j. Perdagangan & Perindustrian; dan
  - k. Pangan dan Koperasi/Usaha Kecil & Menengah.
4. Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang tugas:
- a. Kesejahteraan Sosial;
  - b. Agama;
  - c. Pendidikan;
  - d. Kesehatan;
  - e. Peranan Perempuan;
  - f. Kebudayaan;
  - g. Pemuda & Olahraga;
  - h. Ketenagakerjaan & Transmigrasi;
  - i. Pariwisata;
  - j. Perpustakaan & Arsip;
  - k. Penanggulangan Bencana;
  - l. Penanggulangan Narkotika & Obat Terlarang; serta
  - m. Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukkan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD Kota

Bekasi berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD Kota Bekasi kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut diatas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya local. Kesejahteraan Rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan seperti tampak pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

**PETA PERMASLAAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kota Bekasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat;</li> <li>- Aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi terbatas</li> <li>- Belum adanya fungsional tertentu di Sekretariat DPRD yang sesuai Kebutuhan</li> </ul>
		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana Prasarana TIK PD belum merata</li> <li>- Anggaran Belanja TIK Terbatas</li> </ul>
		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Usulan Rancangan Perundangan yang terlambat disampaikan oleh PD</li> <li>- Kurang Komitmen terhadap jadwal kerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran</li> </ul>
		Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang terlalu cepat</li> <li>- Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD</li> <li>- Banyaknya kegiatan diluar Tupoksi DPRD</li> <li>- Padatnya jadwal kegiatan DPRD</li> </ul>

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2018-2023

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet, kondisi saat ini kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet yang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat ini masih ada beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

3. Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

#### **I.4. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi pada tahun 2022 terdiri dari:

1. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), terdiri dari 1 Program, diantaranya:
  - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 9 Kegiatan yaitu:
    1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
    9. Layanan Administrasi DPRD.
  - B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas 7 Kegiatan yaitu:
    1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
    2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
    3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
    4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
    5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;

6. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
7. Fasilitasi Tugas DPRD.

## **I.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menyajikan Latar Belakang; Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi; Aspek Strategis Organisasi; Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi; Serta Sistematika Penyajian;

BAB II PERENCANAAN KINERJA. Bab ini menguraikan ringkasan dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Bab ini menguraikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP. Bab ini menguraikan Kesimpulan atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 didasarkan atas Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Sekretaris DPRD Kota Bekasi Tahun 2023. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2023.

### **2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian Sakip. Perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis.

Pada tahun 2021 dilakukan Penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Dengan pendekatan perencanaan yang strategis dan sinergi yang baik, instansi pemerintah dapat menyelaraskan Visi Misi-nya dengan potensi, peluang dan Kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

### **2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP.

Selanjutnya perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut, harus

dirumuskan kedalam bentuk berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan: Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD tergambar pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat DPRD 2018-2023**

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan Legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 adalah:

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 (Perubahan)**

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan fasilitasi Kegiatan DPRD secara efektif dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	-	75	75.10	75.20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	77,4	77,5	77,6

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023 (Perubahan) adalah:

Indikator Tujuan:

Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Kegiatan DPRD

Indikator Sasaran:

1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu;
3. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu;
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah.

## 2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bertujuan untuk (1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan (2) memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja. IKU Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.3. dan Tabel 2.4.

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

**OPD : Sekretariat DPRD**

**Visi : Misi Ke-Satu**

NO	TUJUAN	INDIKATO TUJUAN	SASARAN	INDIKATO SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2021	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Terepenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey Rumus Perhitungan:</p> <p><b>U1 s.d U9</b> = Unsur pelayanan</p> <p><b>NNR</b> = Nilai Rata-rata</p> <p><b>IKM</b> = Indeks Kepuasan Anggota DPRD</p> <p>*) = Jumlah NRR IKM Terimbang</p> <p>**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25</p> <p>NRR Per Unsur = <math>\frac{\text{Jml nilai/unsur}}{\text{Jml kuesioner yg terisi}}</math></p> <p>NRR Per Unsur = <math>\text{Jml nilai/unsur} \times 0.011</math></p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77,00

NO	TUJUAN	INDIKATO TUJUAN	SASARAN	INDIKATO SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2021	2020	2021	2022	2023
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu	Jml Perda yg disahkan Raperda yang diusulkan X 100%	Persen	50	50	50.10	50.10	50.15
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey  Rumus Perhitungan : <b>U1 s.d U9 =</b> Unsur Pelayanan <b>NNR =</b> Nilai Rata-rata <b>IKM =</b> Indeks Kepuasan  <b>*) = Jumlah NRR IKM Terimbang</b> <b>***) = Jumlah NRR Tertimbang x 25</b>  NRR Per Unsur = <u>Jml nilai/unsur</u> Jml kuesioner yg terisi NRR Per Unsur = <u>Jml nilai/unsur x 0.011</u>	Indeks	76.61	76.71	76.81	76.91	77.00

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021-2023**

**OPD : Sekretariat DPRD**

**Visi : Misi Ke-Satu**

NO	TUJUAN	INDIKATO TUJUAN	SASARAN	INDIKATO SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2021	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Jumlah Perda yang disahkan Raperda yang diusulkan X 100%	Persen	50	50	75	75.1	75.2
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Perda dan Perkada APBD/ LP2APBD yang disahkan tepat waktu  Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu X 100%	Persen	0	0	75	75.1	75.2
				Prosentase pembahasan LKPJ	LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah						

NO	TUJUAN	INDIKATO TUJUAN	SASARAN	INDIKATO SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2021	2020	2021	2022	2023
				Kepala Daerah	LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu X 100%	Persen	0	0	75	75.1	75.2
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	76.12	77.23	77.4	77.5	77.6

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra 2018-2023, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja.

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, terutama pada target tahunan. Hal ini dikarenakan target tahunan pada anggaran murni tidak sesuai dengan renstra, sehingga kemudian disesuaikan dengan Target IKU yang terdapat pada Renstra Perubahan 2018-2023, seperti tampak pada Tabel 2.5 di bawah.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023**  
**(Murni dan Perubahan)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan		Target Triwulan	
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	100%	75.2%	25%	25%
						25%	25%
						25%	25%
						25%	25%
		2. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	%	100%	75.2%	25%	25%
						25%	25%
						25%	25%
		3. Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	%	100%	75.2%	25%	25%
						25%	25%
						25%	25%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.4	77.6	-	25%
						-	25%
						30%	25%
						40.4%	25%

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2023

Adapun pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 terdapat perubahan, sehingga pada perjanjian kinerja terdapat perubahan pula terhadap perjanjian alokasi anggaran per triwulan seperti tampak pada Tabel 2.6 di atas.

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Per Triwulan (Murni dan Perubahan)**

No	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Murni	91.480.739.138	22.870.184.785	22.870.184.785	22.870.184.785	22.870.184.785
		Perubahan	96.951.819.660	24.237.954.915	24.237.954.915	24.237.954.915	24.237.954.915
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Murni	109.963.994.960	27.490.998.740	27.490.998.740	27.490.998.740	27.490.998.740
		Perubahan	87.999.761.960	21.999.940.490	21.999.940.490	21.999.940.490	21.999.940.490

Sumber : Data diolah Bagian Program dan Keuangan, 2023



Untuk lebih rinci terkait rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dan Perubahannya, dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah:

**Tabel 2.7**  
**Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 (Murni dan Perubahan)**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Ket.			
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
4	2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
4	2	1					<b>91.480.739.138</b>	<b>96.951.819.660</b>				
<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN /KOTA</b>												
4	2	1	2,01				<b>245.815.000</b>	<b>80.000.000</b>				
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD</b>						
4	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bekasi Timur	25 Dok	25 Dok	40.000.000	40.000.000	
4	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	3 Lap	3 Lapn	205.815.000	40.000.000	
4	2	1	2,02					<b>10.735.352.000</b>	<b>10.538.262.000</b>			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD</b>						
4	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	55 Org/Bln	55 Org/Bln	10.498.262.000	10.498.262.000	
4.	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	1 Lap	1 Lap	237.090.000	40.000.000	



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Ket.
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4 2 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD</b>				<b>6.690.976.012</b>	<b>6.778.044.920</b>	
4 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bekasi Timur	873 Lap	873 Lap	50.000.000	25.000.000	
4 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bekasi Timur	4 Paket	4 Paket	950.000.000	1.110.000.000	
4 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	Bekasi Timur	1236 Org/Bln	1236 Org/Bln	5.690.976.012	5.643.044.920	
4 2 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD</b>				<b>7.628.316.564</b>	<b>7.728.316.564</b>	
4 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bekasi Timur	4 Unit	1 Unit	300.000.000	150.000.000	
4 2 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	31 Unit	31 Unit	550.000.000	550.000.000	
4 2 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bekasi Timur	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Ket.
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4 2 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	10 Paket	11 Paket	300.000.000	400.000.000	
4 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bekasi Timur	24.757 Meter Persegi	24.757 Meter Persegi	6.378.316.564	6.528.316.564	
4 2 1 2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD</b>				<b>58.007.950.000</b>	<b>58.007.950.000</b>	
4 2 1 2.15 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Bekasi Timur	600 org/bln	600 org/bln	57.157.950.000	57.157.950.000	
4 2 1 2.15 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Bekasi Timur	150 Paket	5 Paket	700.000.000	700.000.000	
4 2 1 2.15 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Bekasi Timur	50 Org	50 Org	150.000.000	150.000.000	
4 2 1 2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD</b>				<b>750.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
4 2 1 2.16 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Bekasi Timur	40 Lap	40 Lap	750.000.000	1.000.000.000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>					<b>109.963.994.960</b>	<b>87.999.761.960</b>	
4 2 2 2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA</b>				<b>19.200.000.000</b>	<b>7.750.000.000</b>	
4 2 2 2.01 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	2 Dok	2 Dok	1.000.000.000	500.000.000	
4 2 2 2.01 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Bekasi Timur	17 Dok	12 Dok	8.750.000.000	3.500.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Ket.
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
4 2 2 2.01 3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Bekasi Timur	6 Dok	6 Dok	3.250.000.000	1.750.000.000	
4 2 2 2.01 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Bekasi Timur	10 Dok	5 Dok	5.750.000.000	2.000.000.000	
4 2 2 2.01 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	450.000.000	0	
4 2 2 2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD</b>				<b>6.300.000.000</b>	<b>5.800.000.000</b>	
4 2 2 2.02 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	1.050.000.000	
4 2 2 2.02 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	1.050.000.000	
4 2 2 2.02 3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	1.050.000.000	
4 2 2 2.02 4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	1.050.000.000	
4 2 2 2.02 5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	550.000.000	
4 2 2 2.02 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.050.000.000	1.050.000.000	
4 2 2 2.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD</b>				<b>26.864.096.960</b>	<b>22.345.241.960</b>	
4 2 2 2.03 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.689.127.240	4.398.347.240	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Ket.
				Target Sebelum	Capaian Kinerja Sesudah	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	
4 2 2 2.03 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.689.127.240	4.398.347.240	
4 2 2 2.03 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.689.127.240	4.398.347.240	
4 2 2 2.03 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	4.689.127.240	4.398.347.240	
4 2 2 2.03 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	1.500.600.000	1.000.600.000	
4 2 2 2.03 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	4.150.000.000	2.694.265.000	
4 2 2 2.03 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Bekasi Timur	1 Dok	1 Dok	2.456.988.000	1.056.988.000	
4 2 2 2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD</b>				<b>22.860.900.000</b>	<b>24.410.900.000</b>	
4 2 2 2.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Bekasi Timur	13 Dok	13 Dok	8.200.000.000	8.200.000.000	
4 2 2 2.04 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Bekasi Timur	204 Org/bln	204 Org/bln	2.521.612.000	2.341.612.000	
4 2 2 2.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bekasi Timur	54 Org	54 Org	576.000.000	576.000.000	
4 2 2 2.04 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Bekasi Timur	51 Dok	51 Dok	9.978.288.000	11.228.288.000	
4 2 2 2.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Bekasi Timur	2 Dok	3 Dok	1.585.000.000	1.885.000.000	
<b>4 2 2 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD</b>				<b>12.447.800.000</b>	<b>12.447.800.000</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Ket.
				Target Capaian Kinerja Sebelum	Sesudah	Pagu Indikatif (Rp) Sebelum	Sesudah	
4 2 2 2.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Bekasi Timur	3 Lap	3 Lap	405.975.000	405.975.000	
4 2 2 2.05 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	1.225.000.000	1.225.000.000	
4 2 2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	10.616.825.000	10.816.825.000	
4 2 2 2.06	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD</b>				<b>3.089.068.000</b>	<b>700.000.000</b>	
4 2 2 2.06 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Bekasi Timur	12 Lap	12 Lap	3.089.068.000	700.000.000	
4 2 2 2.08	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD</b>				<b>19.202.130.000</b>	<b>14.545.820.000</b>	
4 2 2 2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bekasi Timur	1 Dok	12 Dok	8.245.820.000	6.745.820.000	
4 2 2 2.08 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Bekasi Timur	1 Lap	2 Lap	500.000.000	1.000.000.000	
4 2 2 2.08 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Bekasi Timur	3 Dok	3 Dok	9.156.310.000	5.500.000.000	
4 2 2 2.08 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bekasi Timur	36 Dok	36 Dok	1.300.000.000	1.300.000.000	
						<b>201.444.734.098</b>	<b>184.951.581.620</b>	

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 201.444.734.098,- (murni) dan mengalami perubahan pada ABT 2023 sebesar Rp. 184.951.581.620,-.



## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2023.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2023. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1. Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama tahun 2022, berupa pencapaian fisik yaitu sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2018-2023 serta perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023.

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis. Pada Tahun 2019 dan 2020, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, seperti tampak pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI PADA RPJMD MURNI 2018-2023**

NO (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	SATUAN (3)	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2022 (12)	2023 (13)
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	76,78	76,98	-	-	-
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	82,46	84,71	-	-	-

Sumber : Data diolah Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Tampak pada tabel di atas, realisasi capaian renstra, yaitu: Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD, Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, dan Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target Renstra.

Tahun 2021 terdapat perubahan indikator sasaran menjadi 4 (empat) indikator sasaran, seperti tampak pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD SEKRETARIAT**  
**DPRD KOTA BEKASI PADA RPJMD PERUBAHAN 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN(%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75.10	75.20	-	-	87,51	75	80
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepatwaktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	100
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56	70.08	63.38

Sumber : Data diolah Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam tabel capaian kinerja instansi. Capaian keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh

dari sumber data masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

### 3.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dan Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan, dengan anggaran murni sebesar Rp. 201.444.734.098,- (Dua Ratus Satu Miliar Empat Ratus Empat Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah), serta anggaran perubahan sebesar Rp.184.951.581.620,- (Seratus Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam ratus Dua Puluh Rupiah).

Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2023 secara rinci ditunjukkan dalam Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**EVALUASI CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023**

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>						
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dok	25	100	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Lap	3	100	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/ bln	55	100	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	32 Org	32	100	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Org	48	100	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1	100	
8.	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah pake bahan logistic kantor yang disediakan	4 paket	4	100	
9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4	100	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dok	4	100	
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	1	100	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1	100	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Paket	13	100	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750Lap	750	100	
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Paket	3	75	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	1.236 Org/ bln	1.236	100	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
17.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1	100	
18.	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	31	100	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
19.	Pemeliharaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1	100	
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 paket	11	100	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	24.757 meter persegi	24.757	100	
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>				
22.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	600 org/ bln	600	100	
23.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5	100	
24.	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 org	25	50	
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>Tersedianya Laporan Admnistrasi DPRD</b>				
25.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Lap	40	100	
<b>II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSNAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						
<b>Persentase Terasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA</b>						
26.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dok	2	100	
27.	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dok	15	100	
28.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	6 Dok	6	100	
29.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dok	5	100	
30.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	0	0	
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>				
31.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1	100	
32.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1	100	
33.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1	100	
34.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1	100	
35.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Semester	1 Dok	1	100	
36.	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1	100	
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>Tersedianya Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
37.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Lap	12	100	
38.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Lap	12	100	
39.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Lap	12	100	
40.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Lap	12	100	
41.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Keuangan oleh Bdan Pemeriksa Keuangan	1 Dok	1	100	
42.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	1	100	
43.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	1	100	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>				
44.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	13 Dokumen	13	100	
45.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar	204 org/bln	204	100	
46.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Org	54	100	
47.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	51 Dok	55	107.84	
48.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dok	3	100	
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>				
49.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 Lap	3	100	
50.	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	3 Dok	2	66.67	
51.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	3	100	
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>Terlaksananya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>				
52.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	12	100	
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD</b>				
53.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	4	33.33	

No	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi Th. 2023	Tingkat Capaian %	Ket
54.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun	2 Lap	2	100	
55.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dok	3	100	
56.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dok	36	100	

Sumber : Siencang.bekasikota.go.id/monev2023

Berdasarkan evaluasi diatas, terdapat beberapa Sub. Kegiatan yang capaian target kinerjanya dibawah 100% sebagai berikut:

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian target sebesar 75% dikarenakan pencairan situasional menyesuaikan kebutuhan, terhadap Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
2. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan capaian target sebesar 50% dikarenakan 25 Dewan melakukan MCU secara mandiri sebagai syarat mengikuti Caleg 2024 dari target 50 orang Dewan yang akan melaksanakan MCU.
3. Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan capaian target sebesar 0%. Sub Kegiatan sudah di drop karena tidak adanya kegiatan penyusunan Tata Tertib DPRD di tahun 2023, namun target capaian belum disesuaikan dalam RKA Perubahan, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan.
4. Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan capaian target sebesar 66.67% karena kegiatan hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) dokumen dari target 3 dokumen.
5. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan capaian target sebesar 33.33%, disebabkan lamanya proses perijinan dan administrasi akibat pembatalan perjalanan dinas (*reschedule*).



Secara garis besar pencapaian kinerja dari sub kegiatan-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mencapai target yang direncanakan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapai dengan alasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi:

- a. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
- b. Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.
3. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/ beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU;
3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada Tabel 2.4 di bawah:

**Tabel 3.4**  
**EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2023 TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.20%	80%	106.38%
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
		Prosentase Pembahasan LPKJ Kepala Daerah tepat waktu	75.20%	100%	132.98%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.60	63.38	81.67%

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2023

**1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu.**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKU Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Persen	75,20%	80%	106,38%	99,86 %

*Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023*

Dengan melihat Tabel 3.5 di atas, target penyelesaian Raperda TA 2023 yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 Perda dari 20 Raperda yang tersusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023. Signifikansi kenaikan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 106,38% yang ditahun sebelumnya mencapai 99,86% merupakan capaian yang dianggap sangat baik mengingat keseriusan Anggota DPRD Kota Bekasi dalam pembahasan dan pengkajian Raperda secara komprehensif dan maraton, baik Raperda inisiatif DPRD maupun inisiatif Pemerintah Kota Bekasi.

Faktor lain adalah, bahwa dengan dukungan anggaran yang mengacu pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 serta hasil evaluasi kinerja DPRD tahun 2023, dirasa perlu untuk mendorong komitmen terhadap penyelesaian Raperda yang tersusun dalam Propemperda Tahun 2023.

Perlu diketahui, hanya ada 2 Raperda belum selesai proses finalisasi dan 2 Raperda lainnya telah diluncurkan kembali serta disusun pada Propemperda tahun 2024, sebagai komitmen dalam rangka penyelesaian seluruh Raperda yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 20 Judul Raperda  
Realisasi : 16 Judul Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{16}{20} \times 100\% = 80\%$$

Realisasi penyelesaian melampaui dari target sejumlah 4,8% dengan tingkat capaian sebesar 106,38%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Adanya dukungan anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang berbanding lurus dengan komitmen pengkajian dan pembahasan Raperda.

Sedangkan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pembahasan dan finalisasi seluruh Raperda yang terdapat dalam Propemperda tahun 2023 adalah dikarenakan padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD yang berdampak pada terbatasnya waktu pembahasan, serta finalisasi Raperda terhambat sehingga tidak bisa membentuk pansus penugasan baru.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk indikator Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu di masa yang akan mendatang adalah:

- a. Penjadwalan dan pembahasan secara tepat waktu.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Pemerintah Kota dalam mengawal proses pembentukan Raperda menjadi Perda.
- c. Dukungan Anggaran terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

**2. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

**Tabel 3.6**  
**Capaian IKU Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat Tabel 3.4 di atas, target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%. Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian : 2 Raperda

Realisasi : 2 Raperda

$$\text{Perhitungan : } \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

### **3. Analisis Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna

dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Tabel 3.7**  
**Capaian IKU Prosentase pembahasan**  
**LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu	Persen	75,20 %	100%	132.98 %	100%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023

Dengan melihat Tabel 3.5 di atas, Target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2023 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

<b>Pembahasan LKPJ</b>	
<b>Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu</b>	<b>x 100%</b>

Target Penyelesaian : 1 LKPJ

Realisasi : 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

<b>Perhitungan :</b>	$\frac{1}{1}$	<b>x 100% = 100%</b>
----------------------	---------------	----------------------

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;



- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.
- c. Adanya dukungan dana terhadap Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

**4. Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26).

Perhitungan nilai AKIP sebagai berikut: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja \_ Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target.

**Tabel 3.8  
PENILAIAN SAKIP**

No.	Komponen Yang Dinilai	2023	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20.86
b.	Pengukuran Kinerja	30	20.99
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.34
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11.19
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>63.38</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 63.38%, dengan kategori **“B”**.

Realisasi nilai AKIP pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mencapai target, yaitu realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,67%. Jika dibandingkan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai AKIP tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai AKIP, seperti tampak pada Tabel 3.7 di bawah.

**Tabel 3.9**  
**PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN**  
**CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,5%	70,08%	90,42%	77,6%	63,38%	81,67%

*Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, 2023*

Dengan melihat Tabel 3.7 di atas, realisasi nilai AKIP pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tidak mencapai target, yaitu realisasi sebesar 63,38% dari target 77,6%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 81,67%. Jika dibandingkan nilai AKIP tahun 2023 dengan nilai AKIP tahun 2022, maka terjadi penurunan nilai AKIP.

Capaian Kinerja untuk indikator belum tercapai disebabkan karena: a) Belum selarasnya antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; b) Masih terdapat ketidak selarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek; c) Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja

eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub coordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf); d) Pemberian *reward* dan *punishment* belum berdasarkan capaian kinerja individu; dan e) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja agar sesuai standar dengan: 1) Menyelaraskan substansi seluruh dokumen perencanaan, baik antar dokumen perencanaan maupun substansi dari antar Bab dalam dokumen perencanaan; 2) Memformalkan dokumen perencanaan dan pedoman perencanaan kinerja agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja; 3) Meningkatkan kualitas substansi pada dokumen perencanaan; dan 4) Menyusun Rencana Akasi, Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 sehingga target kinerja dapat dicapai.
- b. Melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yaitu: 1) Melaksanakan pembahasan evaluasi internal triwulanan agar dapat menentukan tindak lanjut atas target sasaran, outcome program, dan output; 2) Memanfaatkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam penempatan/penghapusan jabatan dan penyesuaian organisasi; 3) Meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai dalam hal pengukuran kinerjanya agar dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas.

- c. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja.
- d. Melakukan evaluasi internal secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga dapat meningkatkan implementasi SAKIP, selain itu memperbaiki dan memformalkan SOP Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja agar legal dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja internal.

### **3.3. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2023**  
**(Per 31 Desember 2023)**

**Urusan Pemerintahan : 4. 08.                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD**  
**Unit Organisasi : 4. 08. 01                      Sekretariat DPRD**  
**Sub. Unit Organisasi : 4. 08. 01. 01              Sekretariat DPRD**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.606.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.606.900,00</b>	<b>34,51</b>	<b>52.393.100,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	0,00	14.083.500,00	0,00	14.083.500,00	35,21	25.916.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	0,00	13.523.400,00	0,00	13.523.400,00	33,81	26.476.600,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.538.262.000,00</b>	<b>9.952.742.228,00</b>	<b>27.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980.607.228,00</b>	<b>94,71</b>	<b>557.654.772,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.498.262.000,00	9.952.742.228,00	0,00	0,00	9.952.742.228,00	94,80	545.519.772,00
4.08 . 4.08.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	0,00	27.865.000,00	0,00	27.865.000,00	69,66	12.135.000,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>770.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.206.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.206.941,00</b>	<b>78,47</b>	<b>165.793.059,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	0,00	204.503.600,00	0,00	204.503.600,00	81,80	45.496.400,00
4.08 . 4.08.01.01 . 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000,00	0,00	399.703.341,00	0,00	399.703.341,00	76,87	120.296.659,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.997.329.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.785.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059.785.500,00</b>	<b>84,37</b>	<b>937.544.062,00</b>

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	0,00	148.274.950,00	0,00	148.274.950,00	98,85	1.725.050,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.787.763.000,00	0,00	2.261.984.850,00	0,00	2.261.984.850,00	81,14	525.778.150,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.029.116.562,00	0,00	955.135.000,00	0,00	955.135.000,00	92,81	73.981.562,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000,00	0,00	149.312.700,00	0,00	149.312.700,00	59,73	100.687.300,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.152.450.000,00	0,00	1.145.362.250,00	0,00	1.145.362.250,00	99,38	7.087.750,00
4.08 . 4.08.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.000.000,00	0,00	399.715.750,00	0,00	399.715.750,00	63,65	228.284.250,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.051.916.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.310.000,00</b>	<b>5.986.729.290,00</b>	<b>6.000.039.290,00</b>	<b>99,14</b>	<b>51.877.324,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.051.916.614,00	0,00	13.310.000,00	5.986.729.290,00	6.000.039.290,00	99,14	51.877.324,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.778.044.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.131.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.131.246,00</b>	<b>94,09</b>	<b>400.913.674,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0,00	2.979.000,00	0,00	2.979.000,00	11,92	22.021.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.110.000.000,00	0,00	1.032.854.504,00	0,00	1.032.854.504,00	93,05	77.145.496,00
4.08 . 4.08.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.643.044.920,00	0,00	5.341.297.742,00	0,00	5.341.297.742,00	94,65	301.747.178,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.728.316.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.400.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.400.651,00</b>	<b>92,34</b>	<b>591.915.913,00</b>

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	0,00	67.419.500,00	0,00	67.419.500,00	44,95	82.580.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	0,00	278.338.344,00	0,00	278.338.344,00	50,61	271.661.656,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.05	Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	0,00	99.165.104,00	0,00	99.165.104,00	99,17	834.896,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000.000,00	0,00	371.293.740,00	0,00	371.293.740,00	92,82	28.706.260,00
4.08 . 4.08.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.528.316.564,00	0,00	6.320.183.963,00	0,00	6.320.183.963,00	96,81	208.132.601,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 15</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>7.750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.435.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.435.868,00</b>	<b>91,12</b>	<b>688.564.132,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 15.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	500.000.000,00	0,00	446.033.500,00	0,00	446.033.500,00	89,21	53.966.500,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.500.000.000,00	0,00	3.298.178.135,00	0,00	3.298.178.135,00	94,23	201.821.865,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.750.000.000,00	0,00	1.704.330.633,00	0,00	1.704.330.633,00	97,39	45.669.367,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	2.000.000.000,00	0,00	1.612.893.600,00	0,00	1.612.893.600,00	80,64	387.106.400,00
4.08 . 4.08.01.01 . 15.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 16</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>5.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.925.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.925.019,00</b>	<b>61,65</b>	<b>2.224.074.981,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 16.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.050.000.000,00	0,00	801.694.311,00	0,00	801.694.311,00	76,35	248.305.689,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.050.000.000,00	0,00	622.035.598,00	0,00	622.035.598,00	59,24	427.964.402,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.03	Pembahasan APBD	1.050.000.000,00	0,00	794.065.343,00	0,00	794.065.343,00	75,63	255.934.657,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.04	Pembahasan APBD Perubahan	1.050.000.000,00	0,00	550.137.002,00	0,00	550.137.002,00	52,39	499.862.998,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 16.05	Pembahasan Laporan Semester	550.000.000,00	0,00	206.579.309,00	0,00	206.579.309,00	37,56	343.420.691,00
4.08 . 4.08.01.01 . 16.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.050.000.000,00	0,00	601.413.456,00	0,00	601.413.456,00	57,28	448.586.544,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 17</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>22.345.241.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.595.478.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.595.478.430,00</b>	<b>83,22</b>	<b>3.749.763.530,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 17.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.398.347.240,00	0,00	3.897.507.201,00	0,00	3.897.507.201,00	88,61	500.840.039,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.398.347.240,00	0,00	3.682.041.520,00	0,00	3.682.041.520,00	83,71	716.305.720,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.398.347.240,00	0,00	3.637.563.453,00	0,00	3.637.563.453,00	82,70	760.783.787,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.398.347.240,00	0,00	3.684.949.350,00	0,00	3.684.949.350,00	83,78	713.397.890,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.000.600.000,00	0,00	689.405.905,00	0,00	689.405.905,00	68,90	311.194.095,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.694.265.000,00	0,00	2.233.087.956,00	0,00	2.233.087.956,00	82,88	461.177.044,00
4.08 . 4.08.01.01 . 17.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.056.988.000,00	0,00	770.923.045,00	0,00	770.923.045,00	72,94	286.064.955,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 18</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>24.410.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446.168.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446.168.871,00</b>	<b>59,18</b>	<b>9.964.731.129,00</b>
		8.200.000.000,00	0,00	2.257.978.608,00	0,00	2.257.978.608,00	27,54	5.942.021.392,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.341.612.000,00	0,00	1.661.630.000,00	0,00	1.661.630.000,00	70,96	679.982.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							
4.08 . 4.08.01.01 . 18.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756.000.000,00	0,00	717.200.000,00	0,00	717.200.000,00	94,87	38.800.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 18.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11.228.288.000,00	0,00	8.107.492.582,00	0,00	8.107.492.582,00	72,21	3.120.795.418,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.08 . 4.08.01.01 . 18.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.885.000.000,00	0,00	1.701.867.681,00	0,00	1.701.867.681,00	90,28	183.132.319,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 19</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>12.447.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630.983.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630.983.618,00</b>	<b>85,40</b>	<b>1.816.816.382,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 19.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	405.975.000,00	0,00	258.310.000,00	0,00	258.310.000,00	63,63	147.665.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 19.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000,00	0,00	1.183.081.368,00	0,00	1.183.081.368,00	96,58	41.918.632,00
4.08 . 4.08.01.01 . 19.03	Pelaksanaan Reses	10.816.825.000,00	0,00	9.189.592.250,00	0,00	9.189.592.250,00	84,96	1.627.232.750,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 20</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.616.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.616.307,00</b>	<b>90,23</b>	<b>68.383.693,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 20.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	700.000.000,00	0,00	631.616.307,00	0,00	631.616.307,00	90,23	68.383.693,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 22</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>14.545.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.927.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.927.760,00</b>	<b>57,40</b>	<b>6.196.892.240,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 22.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.745.820.000,00	0,00	1.813.654.160,00	0,00	1.813.654.160,00	26,89	4.932.165.840,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.000.000.000,00	0,00	718.751.627,00	0,00	718.751.627,00	71,88	281.248.373,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.500.000.000,00	0,00	4.755.935.323,00	0,00	4.755.935.323,00	86,47	744.064.677,00
4.08 . 4.08.01.01 . 22.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.300.000.000,00	0,00	1.060.586.650,00	0,00	1.060.586.650,00	81,58	239.413.350,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 23</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>58.007.950.000,00</b>	<b>52.454.839.007,00</b>	<b>693.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.148.084.007,00</b>	<b>91,62</b>	<b>4.859.865.993,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 23.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.157.950.000,00	52.454.839.007,00	0,00	0,00	52.454.839.007,00	91,77	4.703.110.993,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	700.000.000,00	0,00	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00	89,29	75.000.000,00
4.08 . 4.08.01.01 . 23.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	0,00	68.245.000,00	0,00	68.245.000,00	45,50	81.755.000,00
<b>4.08 . 4.08.01.01 . 24</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.456.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.456.802,00</b>	<b>73,45</b>	<b>265.543.198,00</b>
4.08 . 4.08.01.01 . 24.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.000.000.000,00	0,00	734.456.802,00	0,00	734.456.802,00	73,45	265.543.198,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>184.951.581.620,00</b>	<b>62.407.581.235,00</b>	<b>83.964.543.913,00</b>	<b>5.986.729.290,00</b>	<b>152.358.854.438,00</b>	<b>82,38</b>	<b>32.592.727.182,00</b>

Pagu perubahan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 184.951.581.620,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 67.656.212.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.407.581.235,-, sehingga persentase capaian sebesar 92.24% dari total anggaran perubahan tahun 2023.
2. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 111.258.843.006,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.964.543.913,-, sehingga persentase capaian sebesar 75.47% dari total anggaran perubahan tahun 2023.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp. 6.036.526.614,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.986.729.290,-, sehingga persentase capaian sebesar 99.18% dari total anggaran perubahan tahun 2023

Sampai dengan akhir tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merealisasikan anggaran sebesar Rp. 152.358.854.438,- atau sebesar 82.38%. Tidak terserapnya anggaran sebesar 17.62% dengan alasan:

1. Efisiensi
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan undangan
3. BBM dan Tol tidak terserap karena menggunakan transportasi pesawat.
4. Lemahnya perencanaan anggaran

Berdasarkan Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa

Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, rata-rata capaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 **“Tinggi”** dengan nilai 83.33%, capaian program **“Sangat Tinggi”** dengan nilai 93.80%, sehingga rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 95.23% dan rata-rata capaian anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 82.38%, dengan predikat **“Sangat Tinggi”**.

## **BAB IV – PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi ini memberikan gambaran dan hasil analisis dari tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2023 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya dan telah diketahui Sekretaris DPRD Kota Bekasi sebagai pimpinan organisasi.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2023 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun

2018–2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 terpenuhi sesuai dengan harapan.

## **4.2 RENCANA TINDAK**

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2023 adalah tahun pertama periode Renstra 2018-2023. Beberdapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. LKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar terjalin harmonisasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/ perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala OPD;
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil

Wali Kota mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang

Bekasi, 12 Januari 2024

**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**



**Drs. HANAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IVc**  
**NIP. 196440424 199011 1 002**